

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian target kinerja, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perencanaan perbaikan kinerja di masa yang akan datang, sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara optimal. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Teluk Dalam, Maret 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nias Selatan,



dr. HENNY K. DUHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700826 200502 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian target serta mengidentifikasi kesenjangan kinerja sebagai dasar perbaikan di masa mendatang. Penilaian difokuskan pada indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 telah mencapai sebagian besar target kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan sosialisasi, advokasi, monitoring, evaluasi, serta koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan menjadi gambaran menyeluruh atas kinerja tahun 2025 sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3.1 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	9
1.5 Sumber Daya Manusia	10
1.6 Sarana dan Prasarana	12
1.7 Isu Strategis	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Visi dan Misi	14
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	18
2.4 Strategi Kebijakan dan Program	20
2.5 Perjanjian Kinerja	25
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	27
2.7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	70
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 71
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	71
3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	75
3.3 Analisis Capaian Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	86
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja	107
3.5 Efisiensi Anggaran	111
3.6 Realisasi Anggaran	112

BAB IV PENUTUP	117
4.1 Kesimpulan	117
4.2 Saran / Rekomendasi	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5.1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Golongan	10
Tabel 1.5.2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.6 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025	12
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.4.1 Penahapan renstra Dinkes 2025-2029	20
Tabel 2.4.2 Arah Kebijakan Renstra Dinkes	23
Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan	28
Tabel 2.7.1 Indikator Kinerja Bidang Urusan	70
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025	71
Tabel 3.2 Capaian IKK Dinas Kesehatan Tahun 2025	72
Tabel 3.3 Perbandingannya Capaian Program dan kegiatan dengan Target 2025	86
Tabel 3.4 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2025	105
Tabel 3.5 Perhitungan Efisiensi Anggaran TA 2025	111
Tabel 3.6 Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan selama Tahun 2025	112

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada pimpinan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini dilakukan secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada para pemangku kepentingan berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas ini menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yang menuntut setiap penyelenggara negara untuk menjalankan tugas secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi selama satu tahun anggaran, termasuk capaian

indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
 - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Kesehatan primer

- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
- Seksi Kefarmasian
 - Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_39 Tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
- Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
- Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
- Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas Fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset** mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
- c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, bidang kesehatan masyarakat dibantu 3 (tiga) seksi, terdiri atas :

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan , kesehatan kerja dan olah raga.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dibantu 3 (tiga) seks, terdiri atas :

- Seksi Surveilans dan Imunisasi** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi :

- Penyiapan perumusan dan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pelayanan kesehatan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, terdiri atas :

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.
- Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

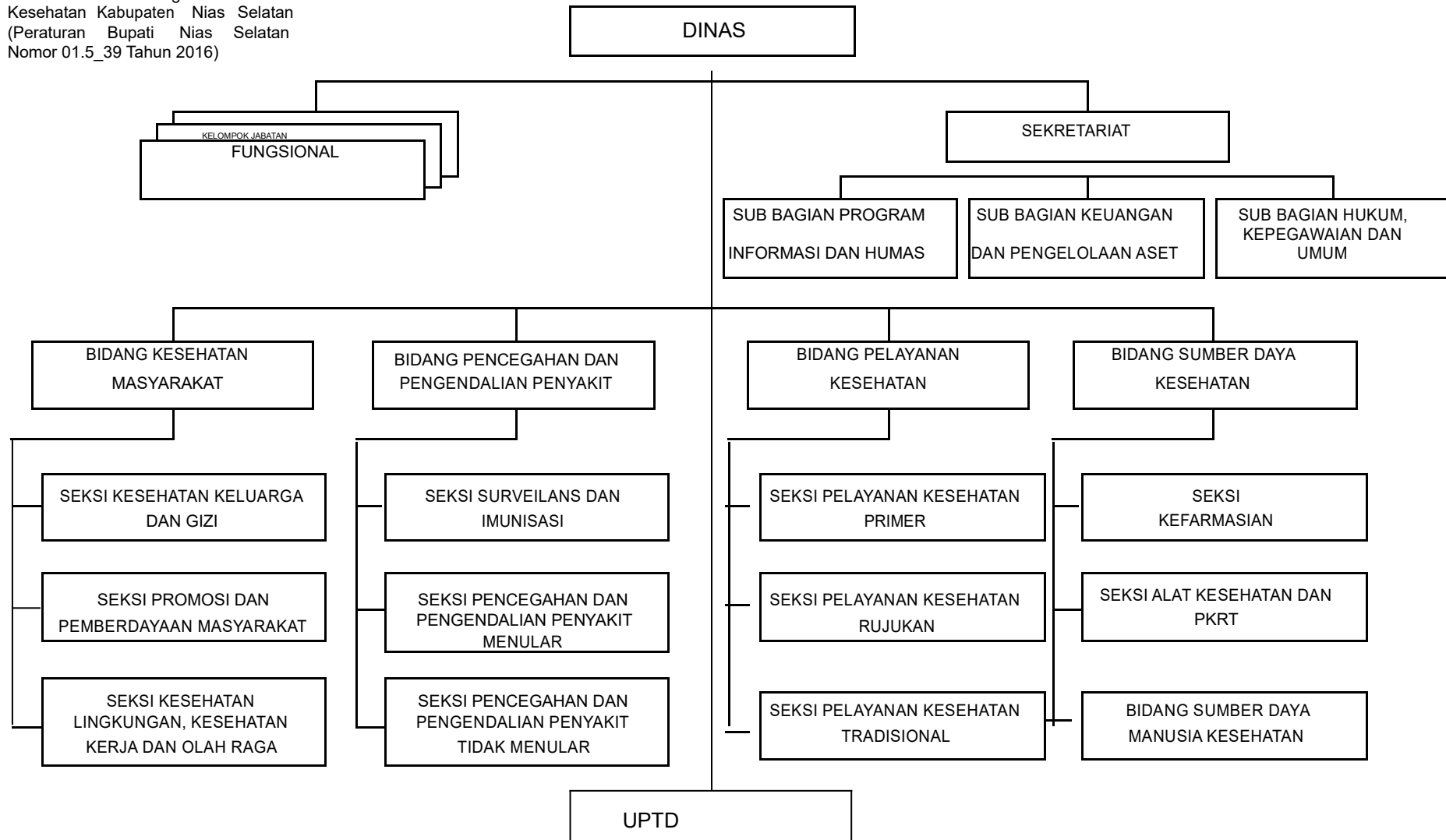
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang sumber daya kesehatan dibantu 3 (tiga) seksi, terdiri atas :

- a. **Seksi Kefarmasian** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian.
- b. **Seksi Alat Kesehatan dan PKRT** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
- c. **Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan , evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia Kesehatan.

1.4 Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
(Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_39 Tahun 2016)



1.5 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Desember 2025, sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, termasuk UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, berjumlah 498 orang terdiri dari laki-laki 134 orang dan perempuan 364 orang.

Tabel 1.5.1 Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Dinas Kesehatan	4	48	4	0	56
2	UPTD Puskesmas Amandraya	1	10	3	0	14
3	UPTD Puskesmas Aramo	0	8	2	0	10
4	UPTD Puskesmas Bawomataluo	0	15	5	0	20
5	UPTD Puskesmas Boronadu	0	5	0	0	5
6	UPTD Puskesmas Gomo	0	11	1	0	12
7	UPTD Puskesmas Hibala	0	4	0	0	4
8	UPTD Puskesmas Hilianombasela	0	6	1	0	7
9	UPTD Puskesmas Hilimegai	0	5	0	0	5
10	UPTD Puskesmas Hilisalawaah	0	7	0	0	7
11	UPTD Puskesmas Hilisataro	1	11	3	0	15
12	UPTD Puskesmas Hilisimaetano	0	23	4	0	27
13	UPTD Puskesmas Hilizalootano	0	8	3	0	11
14	UPTD Puskesmas Huruna	0	12	1	0	13
15	UPTD Puskesmas Idanotae	1	2	1	0	4
16	UPTD Puskesmas Labuhan Hiu	0	4	0	0	4
17	UPTD Puskesmas Lahusa	0	23	1	0	24
18	UPTD Puskesmas Lolomatua	0	9	0	0	9
19	UPTD Puskesmas Lolowau	0	7	3	0	10
20	UPTD Puskesmas Luahagundre Maniamolo	1	3	6	0	10
21	UPTD Puskesmas Mazo	0	4	1	0	5
22	UPTD Puskesmas Onohazumba	0	6	1	0	7
23	UPTD Puskesmas Onolalu	2	6	6	0	14
24	UPTD Puskesmas O'O'U	0	8	1	0	9
25	UPTD Puskesmas P.P Batu Barat	0	2	0	0	2
26	UPTD Puskesmas P.P Batu Utara	0	4	0	0	4
27	UPTD Puskesmas Pulau Tello	0	15	1	0	16
28	UPTD Puskesmas Sidua'Ori	1	11	0	0	12
29	UPTD Puskesmas Simuk	0	3	0	0	3

30	UPTD Puskesmas Somambawa	0	17	2	0	19
31	UPTD Puskesmas Susua	0	3	2	0	5
32	UPTD Puskesmas Tanah Masa	0	3	0	0	3
33	UPTD Puskesmas Teluk Dalam	0	47	9	0	56
34	UPTD Puskesmas Uluidanotae	0	4	1	0	5
35	UPTD Puskesmas Ulunoyo	0	7	0	0	7
36	UPTD Puskesmas Ulususua	0	7	1	0	8
37	UPTD Puskesmas Umbunasi	0	3	1	0	4
38	UPTD RSUD Lukas Hilisimaetano	0	8	1	0	9
39	RSUD Nias Selatan	1	34	8	0	43
	Jumlah	12	413	73	0	498

Tabel 1.5.2 Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	S2	S1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SMA/SMK Sederajat	SMP Sederajat	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	13	24	2	14	1		2		56
2	UPTD Puskesmas Amandraya	1	4		8			1		14
3	UPTD Puskesmas Aramo		4		6					10
4	UPTD Puskesmas Bawomataluo	3	3		14					20
5	UPTD Puskesmas Boronadu			2	3					5
6	UPTD Puskesmas Gomo		5	1	5			1		12
7	UPTD Puskesmas Hibala		2		2					4
8	UPTD Puskesmas Hilianombasela		2		2			3		7
9	UPTD Puskesmas Hilimegai		1		4					5
10	UPTD Puskesmas Hilisalawahe		3		4					7
11	UPTD Puskesmas Hilisataro	1	4	1	7			2		15
12	UPTD Puskesmas Hilisimaetano		9		16			2		27
13	UPTD Puskesmas Hilizalootano				11					11
14	UPTD Puskesmas Huruna				13					13
15	UPTD Puskesmas Idanotae	1			3					4
16	UPTD Puskesmas Labuhan Hiu		2		1			1		4
17	UPTD Puskesmas Lahusa		7		15			2		24
18	UPTD Puskesmas Lolomatua		2		7					9
19	UPTD Puskesmas Lolowau				9			1		10
20	UPTD Puskesmas Luahagundre Maniamolo		2		6			2		10
21	UPTD Puskesmas Mazo		2		3					5
22	UPTD Puskesmas Onohazumba		1		6					7
23	UPTD Puskesmas Onolalu	4	2		7			1		14

24	UPTD Puskesmas O'O'U		1		8					9
25	UPTD Puskesmas P.P Batu Barat				1			1		2
26	UPTD Puskesmas P.P Batu Utara				3			1		4
27	UPTD Puskesmas Pulau Tello	3	2		10			1		16
28	UPTD Puskesmas Sidua'Ori	1	3		7			1		12
29	UPTD Puskesmas Simuk	1			2					3
30	UPTD Puskesmas Somambawa	1	5		13					19
31	UPTD Puskesmas Susua		1		3			1		5
32	UPTD Puskesmas Tanah Masa	1	1		1					3
33	UPTD Puskesmas Teluk Dalam	2	17	2	33			2		56
34	UPTD Puskesmas Uluidanotae				5					5
35	UPTD Puskesmas Ulunoyo	1	1	1	4					7
36	UPTD Puskesmas Ulususua		4		3			1		8
37	UPTD Puskesmas Umbunasi		2		1			1		4
38	RSUD Nias Selatan	9	3	2	27			2		43
39	UPTD RSUD Lukas Hilisimaetano		6		3					9
	Jumlah	42	125	11	290	1	1	29	0	498

1.6 Sarana dan Prasarana

Tabel 1.6 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	2
2	Puskesmas	36
3	Puskesmas Pembantu	68
4	Poskesdes	62
5	Posyandu	484

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Ambulance	46
2	Pusling Air	5
3	Mobil Box Farmasi	1
4	Ambulance Promkes	1
5	Ambulance PSC 119	1

1.7 Isu Strategis

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing, Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan

derajat kesehatan. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi capaian indikator kesehatan, arah kebijakan nasional (RPJMN 2025–2029), serta agenda global (SDGs), terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah.

Berdasarkan hasil analisis, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, dapat dikelompokkan kedalam 9 isu pokok yang wajib mendapat perhatian, yaitu:

1. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar
2. Penurunan Angka Stunting, Kematian Ibu, dan Bayi Melalui Penguatan Layanan KIA dan Gizi
3. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prioritas (Beban Ganda Penyakit
4. Peningkatan kapasitas dan mutu fasyankes primer (Puskesmas) dan rujukan (RSUD) sesuai standar
5. Transformasi Digital tata kelola dan layanan Kesehatan
6. Penguatan sistem kesehatan lingkungan dan peningkatan kesiapsiagaan kesehatan menghadapi perubahan iklim dan bencana
7. Peningkatan ketahanan pembiayaan kesehatan dan keberlanjutan JKN
8. Peningkatan PHBS dan Pemberdayaan masyarakat
9. Penguatan SDM Kesehatan dan pemerataan tenaga medis dan kesehatan di seluruh wilayah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Penyelenggaraan urusan kesehatan dijabarkan melalui struktur perencanaan yang mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang masing-masing diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yang terukur.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang ada di dalam RPJMD selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2025-2029.

2.2 Visi Dan Misi

2.2.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, serta program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nias Selatan terpilih.

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025–2029 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban.”** Visi ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan memiliki daya saing

tinggi melalui pembangunan yang inovatif serta berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan 6 (enam) misi pembangunan, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang siap bekerja dan mampu menciptakan lapangan usaha.
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas korupsi, dengan menjunjung tinggi penegakan hukum serta menjamin hak-hak masyarakat.
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban serta pelestarian lingkungan hidup.

Dalam mencapai Misi 3 yang berkaitan dengan urusan bidang kesehatan, yaitu memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tujuan berupa Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Tujuan ini dijabarkan ke dalam tiga sasaran utama pembangunan, yaitu: (a) Menurunkan prevalensi stunting pada balita sebagai upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak secara berkelanjutan; (b) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan; dan (c) Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta didukung sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan terpencil, memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian integral dari strategi pembangunan manusia seutuhnya, baik secara jasmani maupun rohani, guna

meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Strategi pembangunan di sektor kesehatan difokuskan pada empat pilar utama, yakni:

1. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting,
2. Peningkatan akses layanan kesehatan universal,
3. Penguatan infrastruktur kesehatan masyarakat, dan
4. Peningkatan kualitas hidup keluarga.

Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan kebijakan percepatan pencegahan stunting melalui berbagai langkah konkret. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, penyediaan data kesehatan yang aktual, serta pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih di lokasi-lokasi khusus yang menjadi fokus penanganan stunting. Di samping itu, keterlibatan aktif masyarakat akan ditingkatkan dalam upaya pencegahan dan penuntasan stunting secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas, khususnya untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah juga mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya keikutsertaan dalam sistem jaminan kesehatan agar pelayanan dapat diakses secara adil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada aspek penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas layanan Public Service Care (PSC) seperti ambulans 24 jam akan diperluas guna memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat. Rumah sakit daerah akan ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya agar mampu menjadi rumah sakit rujukan yang layak, dengan kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pemenuhan tenaga medis, termasuk penambahan dokter spesialis, menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Sebagai bentuk kolaborasi dengan sektor swasta, Pemerintah juga mendorong optimalisasi dana pendidikan bidang kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Batu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kesehatan lokal serta memperkuat layanan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas hidup keluarga menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, mencegah pernikahan di bawah umur, serta

memperluas layanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat miskin. Selain itu, edukasi tentang pola hidup sehat dan penguatan peran keluarga akan terus ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berdaya saing

2.2.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan selama lima tahun.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional pada periode 2025–2029 difokuskan pada penguatan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan yang meliputi transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan menetapkan beberapa sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer.
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan.
3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi.
5. Menurunnya prevalensi stunting pada balita.
6. Terkendalnya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
7. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan.
8. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kesehatan.

Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan kesehatan agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan sistem kesehatan daerah.

Beberapa sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
3. Menurunnya prevalensi stunting dan masalah gizi masyarakat.
4. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
5. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan.
6. Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menuju Universal Health Coverage (UHC).
7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan kesehatan agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban", Dalam rangka mencapai visi tersebut, salah satu misi yang sangat relevan dengan urusan kesehatan adalah: Misi 3: "Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani." Dengan demikian, Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan harus merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang sejalan dengan misi tersebut

Penetapan tujuan dan sasaran ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan selaras dengan misi yang diemban. Keberhasilan dari setiap misi diukur melalui indikator kinerja sasaran dengan target yang terukur, sehingga pencapaian pembangunan dapat dievaluasi secara objektif dan akuntabel.

Penyusunan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan merupakan tahapan kunci dalam memastikan arah pembangunan kesehatan daerah yang terstruktur, sistematis, dan selaras dengan visi pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai pilar utama yang menjembatani antara visi-misi Kepala Daerah dengan program dan kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.

Berikut adalah tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dalam periode 2025-2029.

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup	Tahun	72	72,3	72,5	72,7	73	73,2
		Indeks Keluarga Sehat	skore	0,82	0,87	0,9	0,93	0,97	1
	Meningkatnya Status Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian bayi (AKB)	Per 1000 Kelahiran Hidup	6	6	5	5	4	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	Nilai	82	85	89	90	92	95
		Cakupan JKN	%	100	100	100	100	100	100
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	90	90	90	90	90
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	90	91	91	92	91
	Meningkatnya Perilaku Sehat Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	76	78	81	84	87	90

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang terarah, berkesinambungan, dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan menyusun strategi pelaksanaan Renstra dalam lima tahap tahunan, dimulai dari tahun 2026 hingga 2030. Setiap tahap dirancang untuk saling melengkapi dan membangun fondasi yang kokoh menuju sistem kesehatan daerah yang tangguh, inklusif, dan modern.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dalam periode 2025 – 2029, maka strategi yang ditempuh adalah seperti yang dijabarkan dalam table dibawah berikut :

Tabel 2.4.1

Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan sistem informasi kesehatan (SIKDA dan pelaporan Puskesmas).	Rehabilitasi dan pembangunan sarana Puskesmas sesuai standar	Transformasi layanan primer dan rujukan sesuai kebijakan nasional.	Pengembangan sistem surveilans terpadu dan kesiapsiagaan bencana kesehatan.	Memantapkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui desa siaga dan kader aktif.
Peningkatan mutu layanan KIA dan Gizi untuk percepatan penurunan stunting dan AKB.	Peningkatan mutu RSUD dan rumah sakit rujukan	Pengembangan layanan digital (telemedicine, e-rekam medis).	Penguatan logistik dan pembiayaan kesehatan daerah (DBHCHT, kapitasi, dan BOK).	Keberlanjutan program nasional (eliminasi TB, pengendalian stunting, dan PTM).
Pemerataan akses air bersih dan sanitasi	Memperluas cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan.	Peningkatan program pengendalian penyakit menular (TB, HIV) dan PTM (hipertensi, diabetes, kanker).	Penerapan manajemen risiko kesehatan dan tanggap darurat daerah	Sinergi lintas sektor untuk pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies).
Penguatan Puskesmas dan pemerataan distribusi tenaga Kesehatan.	Mendorong Universal Health Coverage (UHC) melalui optimalisasi JKN.	Penguatan program gizi dan kesehatan lingkungan berbasis inovasi	Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam program kesehatan lingkungan dan gizi.	Optimalisasi teknologi digital dan transparansi pelayanan publik kesehatan.
Penguatan promosi kesehatan dan PHBS di masyarakat	Distribusi dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Pemberdayaan kader dan masyarakat dalam	Evaluasi tengah periode Renstra untuk penyesuaian arah kebijakan	Evaluasi akhir Renstra dan perumusan rekomendasi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pencegahan penyakit.		untuk RPJMD berikutnya.

Berikut adalah uraian penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 yaitu :

Tahap I – Tahun 2026: Penguatan sistem dasar pelayanan dan informasi kesehatan.

- a. Penguatan sistem informasi kesehatan (SIKDA dan pelaporan Puskesmas).
Langkah awal untuk memastikan data kesehatan terintegrasi, valid, dan menjadi dasar perencanaan berbasis bukti.
- b. Peningkatan mutu layanan KIA dan gizi
Fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan stunting melalui pelayanan dasar yang optimal.
- c. Pemerataan akses air bersih dan sanitasi
Mengatasi determinan lingkungan kesehatan untuk mencegah penyakit berbasis air.
- d. Penguatan Puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan
Menjamin layanan dasar tersedia merata di seluruh wilayah.
- e. Penguatan promosi kesehatan dan PHBS.
Mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat sebagai dasar keberhasilan pembangunan kesehatan.

Tahap II – Tahun 2027: Pemantapan Infrastruktur dan Sumber Daya

- a. Rehabilitasi dan pembangunan sarana Puskesmas sesuai standar Memastikan fasilitas pelayanan memenuhi standar nasional.
- b. Peningkatan mutu RSUD dan rumah sakit rujukan
Meningkatkan kapasitas rujukan dan mutu layanan sekunder.
- c. Perluasan cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan
Meningkatkan pemerataan dan keadilan akses.
- d. Mendorong Universal Health Coverage (UHC)
Melalui optimalisasi JKN, Memastikan masyarakat terlindungi secara finansial.
- e. Distribusi dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan

Mengurangi ketimpangan distribusi dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Tahap III – Tahun 2028: Transformasi Digital dan Inovasi Program

- a. Transformasi layanan primer dan rujukan
Penyesuaian dengan kebijakan nasional untuk layanan yang lebih efektif dan terintegrasi.
- b. Pengembangan layanan digital (telemedicine, e-rekam medis)
Peningkatan efisiensi dan akses layanan di wilayah sulit dijangkau.
- c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (TB, HIV, hipertensi, diabetes, kanker)
Fokus pada beban ganda penyakit.
- d. Penguatan program gizi dan kesehatan lingkungan berbasis inovasi
Integrasi program preventif dengan pendekatan inovatif.
- e. Pemberdayaan kader dan masyarakat dalam pencegahan penyakit
Pendekatan bottom-up melalui partisipasi masyarakat.

Tahap IV – Tahun 2029: Penguatan Ketahanan dan Integrasi Sistem

- a. Pengembangan sistem surveilans terpadu dan kesiapsiagaan bencana Kesehatan.
Menyiapkan respons cepat terhadap ancaman kesehatan masyarakat.
- b. Penguatan logistik dan pembiayaan kesehatan daerah (DBHCHT, kapitasi, BOK)
Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan.
- c. Penerapan manajemen risiko kesehatan dan tanggap darurat daerah.
Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap KLB, pandemi, dan bencana.
- d. Koordinasi lintas sektor dalam program kesehatan lingkungan dan gizi .
Pendekatan “One Health” dan sinergi dengan sektor lain.
- e. Evaluasi tengah periode Renstra.
Mengukur capaian dan melakukan penyesuaian kebijakan strategis.

Tahap V – Tahun 2030: Kemandirian dan Keberlanjutan

- a. Kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan (desa siaga aktif) .
Pemberdayaan komunitas menuju kesehatan mandiri.
- b. Keberlanjutan program nasional (eliminasi TB, pengendalian PTM, stunting).

Memastikan capaian tetap berlanjut dan tidak menurun.

- c. Sinergi lintas sektor untuk pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies).

Integrasi kesehatan dalam semua kebijakan pembangunan.

- d. Optimalisasi teknologi digital dan transparansi pelayanan public.

Meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

- e. Evaluasi akhir Renstra dan rekomendasi RPJMD berikutnya.

Persiapan perencanaan jangka menengah baru berbasis capaian dan evaluasi.

Penyusunan arah kebijakan tahunan didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah yang berkembang dari waktu ke waktu. Setiap arah kebijakan dirancang untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan, terutama pada level *outcome*, melalui intervensi yang relevan dan terukur di masing-masing sektor.

Arah kebijakan tahunan merupakan bentuk operasionalisasi dari strategi pembangunan daerah yang disusun dalam dokumen renstra perangkat daerah. Arah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fokus pelaksanaan pembangunan secara tahapan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pembangunan kesehatan di Kabupaten Nias Selatan, arah kebijakan tahunan tahun 2026 sampai 2029 mencerminkan kesinambungan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra PD (Perangkat Daerah) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.2

**Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerapan intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk ibu hamil dan balita sesuai pedoman standar pelayanan minimal bidang gizi.	Memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita	Penguatan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif bagi Ibu Hamil dan Balita	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
2	Pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan ibu dan anak (KIA) secara terintegrasi berbasis e-health sesuai regulasi nasional.	Menyediakan data kesehatan ibu hamil dan bayi yang aktual	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak yang Terintegrasi dan Aktual	
3	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi dan air bersih berbasis masyarakat di daerah stunting sesuai standar teknis Kemenkes.	Memprioritaskan penyediaan infrastuktur sanitasi dan air bersih di lokasi khusus stunting	Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur Dasar Sanitasi dan Air Bersih di Wilayah Prioritas Stunting	
4	Penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan dalam upaya promotif dan preventif berbasis pemberdayaan masyarakat.	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penuntasan stunting	Penguatan Peran Serta Masyarakat dan Kader Kesehatan dalam Pencegahan Stunting	
5	Pendaftaran penduduk miskin dan rentan ke dalam JKN serta fasilitasi kepesertaan melalui integrasi data dan kerja sama lintas sektor.	Meningkatkan Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan	Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
6	Pengadaan dan operasionalisasi layanan ambulans 24 jam sesuai standar layanan gawat darurat terpadu (PSC 119).	Meningkatkan kualitas Public Service Care (PSC): Ambulance 24 Jam	Peningkatan Kapasitas Layanan Public Service Center (PSC) 24 Jam	
7	Pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM rumah sakit rujukan sesuai standar rumah sakit kelas C/D sesuai kebutuhan wilayah	Meningkatkan Kualitas Layanan Rumah Sakit layak rujukan di Kabupaten Nias Selatan	Penguatan Fungsi Rumah Sakit Sebagai Rujukan Regional di Kabupaten Nias Selatan	
8	Pemenuhan formasi dan distribusi dokter spesialis melalui koordinasi dengan Kemenkes dan pendayagunaan program WCP (Wajib Kerja Dokter Spesialis).	Memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis	Strategi Pemenuhan dan Pemerataan Dokter Spesialis	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
9	Penyediaan beasiswa atau bantuan pendidikan kesehatan berbasis kerja sama dengan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).	Memfasilitasi dana pendidikan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Batu melalui CSR Perusahaan	Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam Pendidikan Kesehatan melalui Dana CSR	
10	Pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan nasional.	Meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan di Seluruh Jenis Fasilitas Kesehatan	

2.5 Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian kinerja murni atau sebelum perubahan tahun 2025, dapat dilihat pada table di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	89
2	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (AUHH)	69,18 Tahun

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.226.990.880,30	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 102.129.794.889,58	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 4.713.480.750	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 72.560.0000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.597.151.800	
Jumlah		Rp 112.739.978.319,88	

Oleh karena Pergeseran, dan juga peralihan dengan Kepala Daerah terbaru serta disusunnya RPJMD 2025-2029, maka terdapat perubahan indicator kinerja yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja mengikuti renstra terbaru yaitu 2025-2029. Selain itu P-APBD tidak terlaksana, maka terdapat pergeseran anggaran dari DPA murni dan pergeseran untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai target, maka perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan sehingga Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat seperti di bawah ini

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72 Tahun
		Indeks Keluarga Sehat	0,82
2	Meningkatnya Status Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	6 Per 1000 Kelahiran Hidup
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90%
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	90 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	82
		Cakupan JKN	100%
3	Meningkatnya Perilaku Sehat Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	76 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.600.063.000,00	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp108.728.087.458,50	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp4.583.283.692,00	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp71.238.324,00	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp406.321.800,00	
Jumlah		Rp118.388.994.274,50	

:

2.6 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang memuat satu atau lebih kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sementara itu, kegiatan perangkat daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) dari suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Kesehatan Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang diarahkan baik untuk mendukung pencapaian secara langsung sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, maupun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi.

Program dan kegiatan prioritas tersebut telah dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan berupa pagu indikatif yang selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Perubahan dimaksud memuat program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksanaan program perangkat daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disajikan pada tabel lampiran di bawah ini.

Tabel 2.6
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian REN JA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target REN JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Peran gkat Daerah Penang ggu ng Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Kesehatan							118.641.798.750,00	112.739.978.319,88	124.417.300.456,10					163.315.000.000,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							118.641.798.750,00	112.739.978.319,88	124.417.300.456,10					163.315.000.000,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							118.641.798.750,00	112.739.978.319,88	124.417.300.456,10					163.315.000.000,00			
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.410.000.000,00	4.226.990.880,30	4.600.063.000,00						7.570.000.000,00		
	1	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	17 dokumen	290.000.000,00	50.000.000,30	50.000.000,30			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	ASN		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	7.362.000,30	3.681.000,15	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	7.220.000,00	3.610.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	7.850.000,00	3.925.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	7.140.000,00	3.570.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	6.610.000,00	3.305.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	7.260.000,00	3.630.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.001	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	6.558.000,00	3.279.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	14 bulan	350.000.000,00	275.920.000,00	275.920.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	ASN			460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.002	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	300.000.000,00	244.800.000,00	244.800.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.002	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi					2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	31.120.000,00	15.560.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Pelaksanaan Tugas ASN									atan, Semua Kel/De sa			nan Keseha tan					
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			-	6 dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	ASN		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	100 persen	600.000.000,00	150.500.000,00	150.500.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	ASN		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

	1	0	0	2.	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	150.500.000,00	104.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.750.000.000,00	1.703.857.480,00	1.703.857.480,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	-		2.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	36.001.900,00	25.201.330,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	36.041.000,00	25.228.700,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengeluaran dan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	181.623.400,00	91.291.045,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengeluaran dan pelayanan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	78.153.180,00	39.076.590,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengeluaran dan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	600.000.000,00	1.372.038.000,00	686.019.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengeluaran dan pelayanan Kesehatan			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan pengeluaran dan pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

							Elektronik pada SKPD								Kel/De sa			Keseha tan				
	1	0 2	0 1	2. 0 7		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	-	-		-	-	500.000.0 00,00	48.633.40 0,00	48.633.40 0,00			-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan	-		700.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 1	2. 0 7	00 05	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	300.000.0 00,00	48.633.40 0,00	34.699.60 0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			400.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 1	2. 0 7	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	200.000.0 00,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			300.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 1	2. 0 8		Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	-	-		-	-	670.000.0 00,00	1.108.080. 000,00	1.108.080. 000,00			-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan	-		890.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 1	2. 0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Lapora n	4 Lapora n	20.000.00 0,00	36.000.00 0,00	25.200.00 0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			30.000.00 0,00	DINAS KESE HATA N

	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Lapora n	4 Lapora n	100.000.0 00,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			200.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2. 0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				4 Lapora n	4 Lapora n	50.000.00 0,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			60.000.00 0,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Lapora n	4 Lapora n	500.000.0 00,00	1.072.080. 000,00	1.582.080. 000,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			600.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2. 0 9		Pemeliha ran Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	-	-			-	-	1.000.000. 000,00	860.000.0 00,00	860.000.0 00,00			-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan	-		1.400.000. 000,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2. 0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				30 Unit	30 Unit	200.000.0 00,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			300.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N

[illegible]

							Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	200.000.0 00,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			300.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N	
2	1	0 2	0 2				PROGRA M PEMENU HAN UPAYA KESEHAT AN PERORAN GAN DAN UPAYA KESEHAT AN MASYARA KAT	-				-	-	109.896.7 98.750,00	102.129.7 94.889,58	114.756.3 93.640,10							150.930.0 00.000,00		
	1	0 2	0 2	2. 0 1			Penyediaa n Fasilitas Pelayanan Kesehata n untuk UKM dan UKP Kewenang an Daerah Kabupate n/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-			-	100 %	70.751.79 8.750,00	26.874.21 9.799,00	26.874.21 9.799,00			-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan	Puske smas dan Ruma h Sakit			102.300.0 00.000,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 2	2. 0 1	00 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																			
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					2 Unit	2 Unit	5.000.000. 000,00	0,00	5.536.916. 469,00	Kab. Nias Selata n, Teluk Dalam, Hiliana 'a	DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Fisik- Bidang Kesehat an dan KB- Reguler- Pelayan an Kesehat an Dasar	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			6.000.000. 000,00	DINAS KESE HATA N	

	1	0	0	2.	00	Pembangunan Puskesmas																	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	10.000.00 0.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Hibala, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Fisik- Bidang Kesehat an dan KB- Reguler- Pelayan an Kesehat an Dasar	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			15.000.00 0.000,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2.	00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	10.000.00 0.000,00	220.000.0 00,00	434.000.0 00,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Fisik- Bidang Kesehat an dan KB- Reguler- Pelayan an Kesehat an Dasar	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			15.000.00 0.000,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2.	00	Pengembangan Puskesmas																	
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				10 Unit	10 Unit	2.251.798. 750,00	604.000.0 00,00	1.036.000. 000,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua	DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan			3.000.000. 000,00	DINAS KESE HATA N

							dan SDM agar Sesuai Standar									Kel/De sa	Kesehat an		Keseha tan					
	1	0 2	0 2	2. 0 1	00 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Oleh Rumah Sakit				2 Unit	1 Unit	2.000.000. 000,00	5.000.000. 000,00	5.000.000. 000,00	Kab. Nias Selata n, Teluk Dalam, Hiliana 'a	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan				3.000.000. 000,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 2	2. 0 1	00 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Oleh Puskesmas				10 Unit	10 Unit	2.000.000. 000,00	3.270.138. 800,00	3.184.488. 800,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembak au (CHT) DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an DAK Fisik- Bidang Kesehat an dan KB- Reguler- Pelayan an Kesehat an Dasar	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan				3.000.000. 000,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 2	2. 0 1	00 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	840.000.000,00	902.745.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditetu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			2.000.000.000,00	DINAS KESE HATA N
	1	02	02	201	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaaa n				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditetu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an	-	Mening katkan kualita s pengel olaan dan Pelaya nan Pendi kan			2.000.000.000,00	DINAS KESE HATA N
	1	02	02	201	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	15.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditetu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Fisik-Bidang Kesehat an dan KB-Reguler-Pelayan an Kesehat an Dasar DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			20.000.000.000,00	DINAS KESE HATA N

[illegible]

							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					2 Unit	2 Unit	10.000.00 0.000,00	748.000.0 00,00	833.950.0 00,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Hiliana 'a Kab. Nias Selatan, Maniamolo, Hilisimaetano	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pelayanan kesehatan				15.000.00 0.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2. 0 1	00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					50 Paket	50 Paket	10.000.00 0.000,00	11.865.52 7.399,00	12.954.51 9.637,58	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan pelayanan kesehatan				15.000.00 0.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2. 0 1	00 25	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																			

							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				40 Layan an	40 Layan an	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				30 Paket	30 Paket	500.000.000,00	1.326.553.600,00	1.326.465.113,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-			-	100 %	38.745.000.000,00	74.729.840.090,58	74.729.840.090,58			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Masyarakat		48.030.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3000 Orang	3000 Orang	1.000.000.000,00	2.869.142.000,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3000 Orang	3000 Orang	1.100.000.000,00	3.018.474.000,00	1.677.119.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2500 Orang	2500 Orang	1.000.000.000,00	852.970.000,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1000 Orang	1000 Orang	550.000.000,00	4.265.380.000,00	47.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					20000 Orang	20000 Orang	410.000.000,00	746.820.000,00	846.519.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					15000 Orang	15000 Orang	510.000.000,00	3.271.720.000,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					10000 Orang	10000 Orang	650.000.000,00	1.006.265.000,00	241.695.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5000 Orang	5000 Orang	550.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	350.000.000,00	828.760.000,00	828.760.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar					150 Orang	150 Orang	350.000.0 00,00	401.000.0 00,00	401.000.0 00,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupat en/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			450.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar					100 Orang	100 Orang	550.000.0 00,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupat en/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			600.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					10 Dokumen	10 Dokumen	10.100.000.000,00	4.512.417.000,00	13.264.179.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan				10.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan				150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					5 Dokumen	5 Dokumen	1.100.000.000,00	766.650.000,00	1.172.155.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan				1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

	1	0	0	2.	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5 Doku men	5 Doku men	250.000.0 00,00	4.144.738. 000,00	3.545.128. 000,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupat en/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			300.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2.	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan					30 Orang	30 Orang	100.000.0 00,00	1.088.180. 000,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupat en/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			150.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0	0	2.	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		

							Jumlah Penyalahgun a NAPZA yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	100.000.0 00,00	0,00	1.641.690. 000,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			150.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N	
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Doku men	10 Doku men	2.050.000. 000,00	2.015.380. 000,00	3.973.060. 000,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupat en/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			2.100.000. 000,00	DINAS KESE HATA N	
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000.000,00	26.500.000.000,00	30.905.506.234,94	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				50 Paket	50 Paket	50.000.000,00	0,00	17.836.984,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Kabupaten/ Kota Sehat					2 Doku men	2 Doku men	210.000.0 00,00	496.458.0 90,58	703.333.1 52,58	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupat en/Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			250.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					10 Doku men	10 Doku men	1.000.000. 000,00	6.187.300. 000,00	6.683.142. 200,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Penggun aannya Bidang Kesehat an DAK Fisik- Bidang Kesehat an dan KB- Reguler- Pelayan an Kesehat an Rujukan	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			1.500.000. 000,00	DINAS KESE HATA N
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				36 Dokumen	36 Dokumen	500.000.000,00	9.069.116.000,00	9.178.190.999,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	00	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				38 Unit	38 Unit	2.500.000.000,00	0,00	139.559.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	00	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	00	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																

							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	1.100.000. 000,00	1.000.000. 000,00	1.000.000. 000,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			1.200.000. 000,00	DINAS KESE HATA N	
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	100.000.0 00,00	0,00	200.000.0 00,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			150.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N	
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	250.000.0 00,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAU yang Ditentu kan Pengg aannya Bidang Kesehat an DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskes mas	-	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan			300.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N	
	1	0 2	0 2	2. 0 2	00 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	877.300.000,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	90.620.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	811.770.000,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

																DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskesmas							
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			-	100 %	200.000.000,00	525.735.000,00	525.735.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Puskesmas dan Rumah Sakit		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	525.735.000,00	867.168.250,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan izin rumah sakit	-			-	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	160.536.300,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	2.760.000.000,00	4.713.480.750,00	4.583.283.692,00							4.115.000.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian izin praktek tenaga kesehatan	-			-	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Tenaga Kesehatan		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	0	0	2.	00	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan pelayanan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	66.206.846,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	-			-	100 %	2.110.000.000,00	3.642.000.000,00	3.642.000.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Tenaga Kesehatan		3.215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	0	0	2.	00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				40 Orang	40 Orang	2.000.000.000,00	3.642.000.000,00	2.870.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	346.246.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	-			-	100 %	500.000.000,00	1.071.480.750,00	1.071.480.750,00			-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan	Tenaga Kesehatan		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					50 Orang	50 Orang	500.000.000,00	1.071.480.750,00	1.300.830.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	150.000.000,00	72.560.000,00	71.238.324,00							210.000.000,00	
	1	02	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pemberian izin apotek,toko obat, toko alat kesehatan dan optikal	-			-	100 %	100.000.000,00	72.560.000,00	72.560.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	72.560.000,00	71.238.324,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	102	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	-	25.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	102	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Industri Rumah Tangga			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	206	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																			

							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					10 Unit	10 Unit	25.000.00 0,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kab. Nias Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Pengawa san Obat dan Makana n	Melanjut kan hilirisasi dan mengem bangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningk atkan nilai tambah di dalam negeri.	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan				30.000.00 0,00	DINAS KESE HATA N
5	1	0 2	0 5			PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYARA KAT BIDANG KESEHAT AN	-				-	-	425.000.0 00,00	1.597.151. 800,00	406.321.8 00,00								490.000.0 00,00		
	1	0 2	0 5	2. 0 2		Pelaksana an Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Terlaksana an sehat dalam rangka promotif dan preventif	-			-	100 %	400.000.0 00,00	1.130.071. 800,00	1.130.071. 800,00			Memban gun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pembera ntasan kemiski nan.	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan	Masy araka t			460.000.0 00,00	DINAS KESE HATA N	
	1	0 2	0 5	2. 0 2	00 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																			

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	1.130.071.800,00	406.321.800,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memban gun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pembera ntasan kemiski nan.	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan				400.000.000,00	DINAS KESE HATAN
	1	02	05	202	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat					100 Keluar ga	100 Keluar ga	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memban gun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pembera ntasan kemiski nan.	Mening katkan pengel olaan dan pelaya nan Keseha tan				60.000.000,00	DINAS KESE HATAN

	1	0	0	2.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100 %	25.000.000,00	467.080.000,00	467.080.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan pengeluaran dan pelayanan Kesehatan	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	467.080.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan pengeluaran dan pelayanan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H											118.641.798.750,00	112.739.978.319,88	124.417.300.456,10						163.315.000.000,00			

2.7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini diuraikan tentang indikator-indikator kinerja dari Dinas Kesehatan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.7.1 Indikator Kinerja Bidang Urusan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	69,5	72	72,3	72,5	72,7	73	73,2	
2.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	-	0,82	0,87	0,9	0,93	0,97	1	
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	3,2	6	6	5	5	4	4	
4.	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	76	76	78	81	84	87	90	
5.	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Nilai	81	82	85	89	90	92	95	
6.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	91	100	100	100	100	100	100	
7.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	28,13	90	90	90	90	90	90	
8.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	96	90	90	91	91	92	92	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Hal yang paling penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pelaksanaan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis dari pengukuran kinerja tersebut. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Secara umum, pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir RPMD
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72 Tahun	71,92 Tahun	73,06 Tahun
		Indeks Keluarga Sehat	0,82	0,78	1
2	Meningkatnya Status Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	6 Per 1000 Kelahiran Hidup	2 Per 1000 Kelahiran Hidup	4 Per 1000 Kelahiran Hidup
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	90%	123%	90 %

		tuberkulosis (treatment coverage)			
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	90 %	61,60%	92 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	82	82,2	95%
		Cakupan JKN	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Perilaku Sehat Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	76 %	78%	90%

Tabel 3.2
Tabel Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Capaian 2025
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	67	100	65
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	37,6	34,77	8.3
3	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	-	50	47
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	50	55	50
5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	40	50	50
6	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	31	100	77,4

7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77	100	100
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	80	100	100
9	Persentase desa/kelurahan di wilayah kabupaten/kota yang memiliki UKBM yang berfungsi aktif.	%	80	85	73,6
10	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	63	65	64,6
11	Persentase desa yang memiliki regulasi / kebijakan kesehatan	%	-	50	40
12	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	60	60	60
13	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	70	60
14	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	84	100	100
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	89	100	100
16	Persentase layanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	%	75	85	75
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	70	100	100
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	75	100	100
19	Persentase pangan industri rumah tanggaman dan bermutu	%	50	55	40

20	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	11,7	100	29,38
21	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar	%	-	50	40
22	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	-	80	75
23	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	0	0	0
24	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	30	30	30
25	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	-	50	40
26	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	-	50	40
27	Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai standar profesi	%	40	50	50
28	Persentase TPM yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari total TPM yang terdaftar	%	-	50	30
29	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
30	Presentase fasilitas pelayanan kafarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	-	50	35
31	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	-	50	40

32	Presentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	11	50	16
33	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	-	50	40
34	Presentase tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktik	%	80	90	90
35	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	-	1,2	1
36	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	%	-	8	7
37	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	-	80	50
38	Rasio Dokter terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	0,18	0,23	0,18
39	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	4	5	5,5
40	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	-	20	10
41	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	40	95	28
42	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88	100	100
43	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	35	3,92 %
44	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	%	70	100	100
45	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	46	100	100

3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan di bidang kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat secara menyeluruh. Derajat kesehatan merupakan gambaran profil kesehatan individu atau kelompok individu (masyarakat) di suatu daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan arah dari pembangunan kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

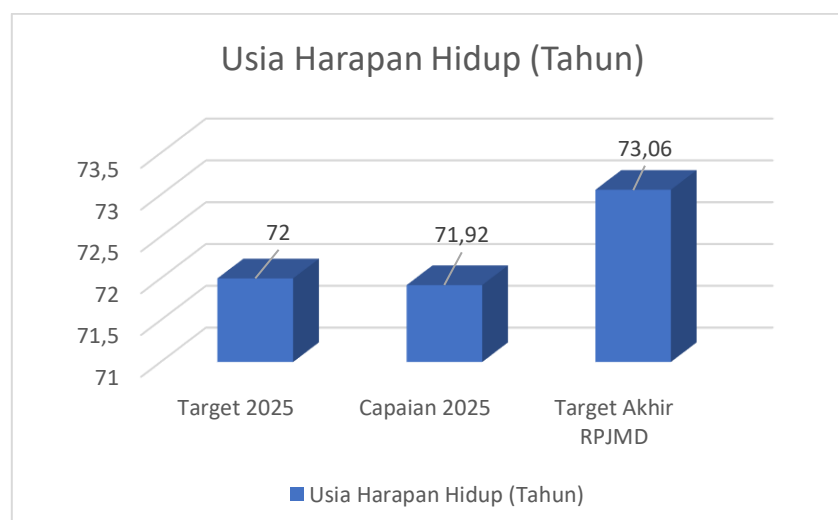
Derajat kesehatan masyarakat tercermin dari berbagai indikator kesehatan seperti angka harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, status gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Upaya peningkatan derajat kesehatan ini dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah bidang kesehatan berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperkuat pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, serta penguatan sistem rujukan menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.

Pengukuran terhadap tujuan strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dilakukan melalui dua indikator utama yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Kedua indikator ini menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara komprehensif, baik dari aspek hasil pembangunan kesehatan maupun dari aspek perilaku dan kondisi kesehatan keluarga.

Diagram 3.2.1

Target dan Capaian Indikator Usia Harapan Hidup



Indikator **Usia Harapan Hidup (UHH)** menggambarkan rata-rata perkiraan lamanya hidup yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas pada saat tersebut tetap berlaku sepanjang hidupnya. Pada tahun 2025, target UHH ditetapkan sebesar **72 tahun**, sedangkan realisasi yang dicapai adalah **71,92 tahun**. Capaian ini menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai, namun selisih capaian relatif kecil sehingga masih berada pada jalur yang mendukung pencapaian **target akhir RPJMD sebesar 73,06 tahun**. Peningkatan usia harapan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

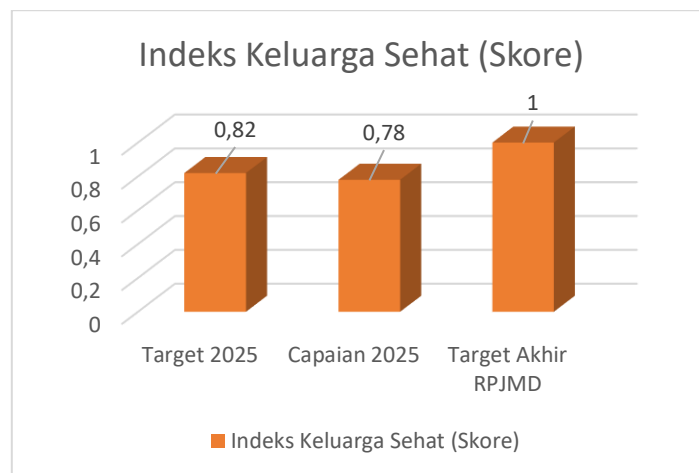
Capaian UHH yang mendekati target menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini antara lain didukung oleh peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta berbagai program pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi peningkatan UHH, di antaranya masih adanya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung yang cenderung meningkat, serta faktor risiko kesehatan yang berkaitan dengan pola hidup masyarakat seperti kurangnya aktivitas fisik, pola konsumsi makanan yang kurang sehat, dan kebiasaan merokok. Selain itu, kondisi geografis wilayah serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa daerah juga dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata.

Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan Usia Harapan Hidup secara berkelanjutan, diperlukan penguatan berbagai intervensi kesehatan terutama melalui pendekatan promotif dan preventif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, penguatan deteksi dini penyakit tidak menular, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan peningkatan Usia Harapan Hidup dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target akhir RPJMD dapat tercapai serta mampu menggambarkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Diagram 3.2.2
Target dan Capaian Indikator Indeks Keluarga Sehat



Sementara itu, indikator **Indeks Keluarga Sehat (IKS)** digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga berdasarkan beberapa indikator utama Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Indeks ini menggambarkan kondisi kesehatan keluarga yang mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kepesertaan jaminan kesehatan, serta perilaku hidup sehat dalam keluarga. Pada tahun 2025, target IKS ditetapkan sebesar **0,82**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **0,78**. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga.

Belum optimalnya capaian Indeks Keluarga Sehat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya keluarga yang belum sepenuhnya memenuhi indikator keluarga sehat seperti kepatuhan dalam pengobatan penyakit kronis, kepemilikan akses sanitasi yang layak, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemanfaatan layanan kesehatan secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga melalui peningkatan kunjungan keluarga oleh tenaga kesehatan, penguatan promosi kesehatan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga.

Secara keseluruhan, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat terus mengalami perbaikan meskipun masih diperlukan berbagai upaya peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu terus diperkuat melalui pendekatan promotif dan preventif, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesehatan.

3.1.1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pengukuran terhadap sasaran strategis Meningkatnya Status Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilakukan melalui beberapa indikator kinerja utama yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Indikator-indikator tersebut menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Diagram 3.2.3

Target dan Capaian Indikator Angka Kematian Bayi



Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2025, terdapat 13 laporan kasus kematian Bayi (0-12 bulan) dari total 7676 kelahiran hidup, dan target AKB ditetapkan sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 2 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, capaian indikator

ini telah melampaui target yang ditetapkan serta lebih baik dari target akhir RPJMD sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena tidak hanya melampaui target tahunan tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh meningkatnya cakupan pelayanan antenatal care, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, serta peningkatan sistem rujukan maternal dan neonatal. Selain itu, kegiatan pemantauan kesehatan ibu dan bayi melalui posyandu dan peran kader kesehatan juga turut berkontribusi dalam menurunkan angka kematian bayi.

Diagram 3.2.4

Target dan Capaian Indikator Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)

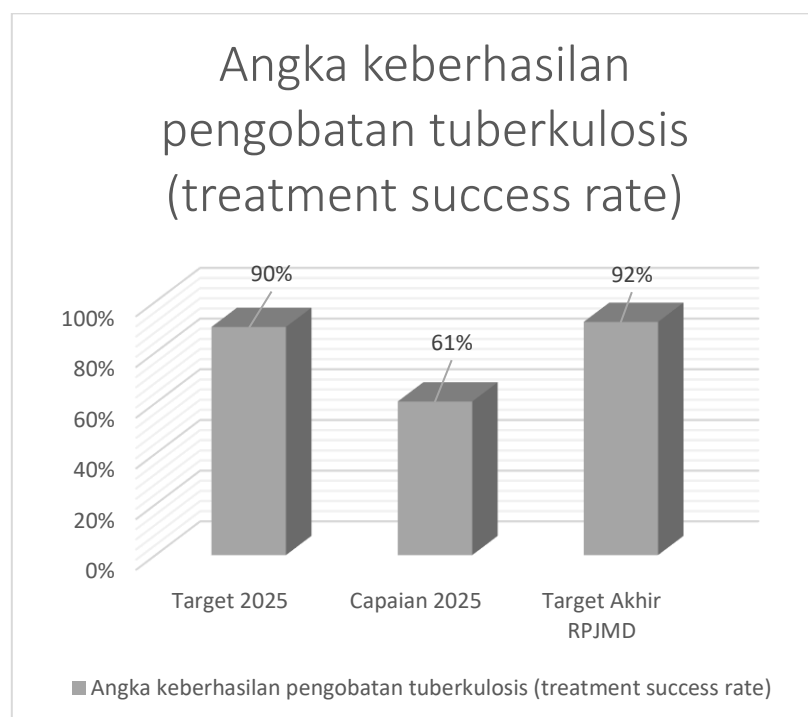


Indikator **cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis** menggambarkan kemampuan sistem pelayanan kesehatan dalam menemukan dan memberikan pengobatan kepada penderita tuberkulosis secara tepat waktu. Target indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **90%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **123%**.

Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan. Tingginya cakupan penemuan kasus tuberkulosis menunjukkan bahwa kegiatan skrining, pelacakan kontak, serta upaya penemuan kasus secara aktif di masyarakat telah berjalan secara optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan diagnosis tuberkulosis serta dukungan program nasional pengendalian TB juga berkontribusi terhadap capaian tersebut. Namun demikian, tingginya angka penemuan kasus juga menunjukkan masih adanya beban penyakit tuberkulosis yang perlu ditangani secara berkelanjutan melalui penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, serta pengobatan yang tuntas.

Diagram 3.2.5

**Target dan Capaian Indikator Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis
(treatment success rate)**

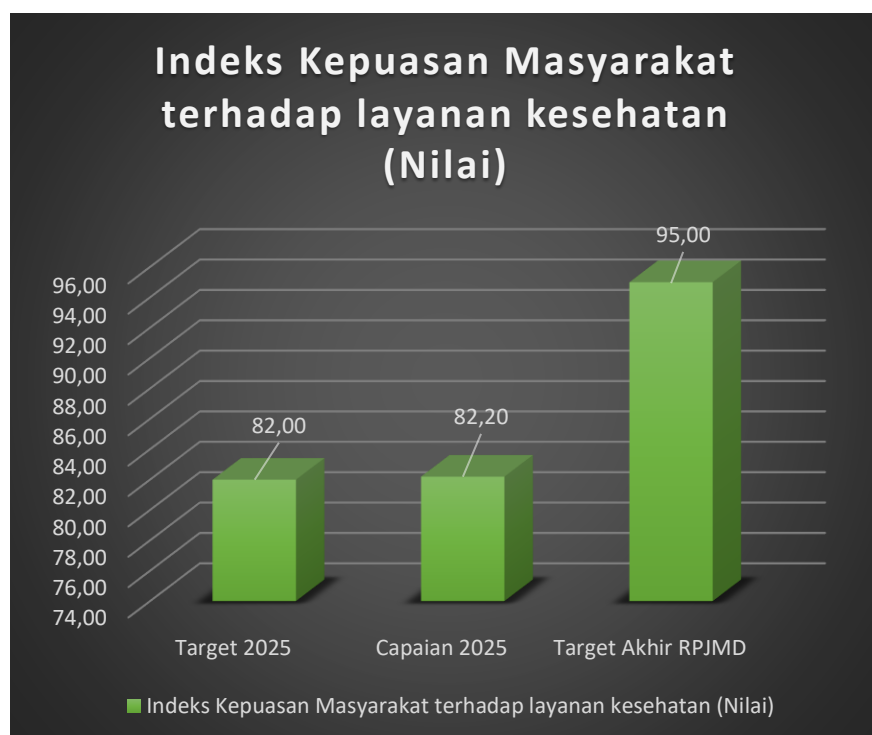


Indikator **angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis** menunjukkan persentase pasien TB yang berhasil menyelesaikan pengobatan sesuai standar hingga dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap. Pada tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar **90%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **61,60%**, sehingga masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan serta target akhir RPJMD sebesar **92%**.

Rendahnya capaian indikator ini menunjukkan bahwa meskipun penemuan kasus TB cukup tinggi, keberhasilan pengobatan pasien TB masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hingga tuntas, kasus putus berobat (loss to follow up), keterbatasan pengawasan minum obat, serta faktor sosial ekonomi dan mobilitas pasien. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pemantauan pengobatan melalui peningkatan peran pengawas menelan obat (PMO), peningkatan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta penguatan pelacakan pasien TB.

Diagram 3.2.6

Target dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan



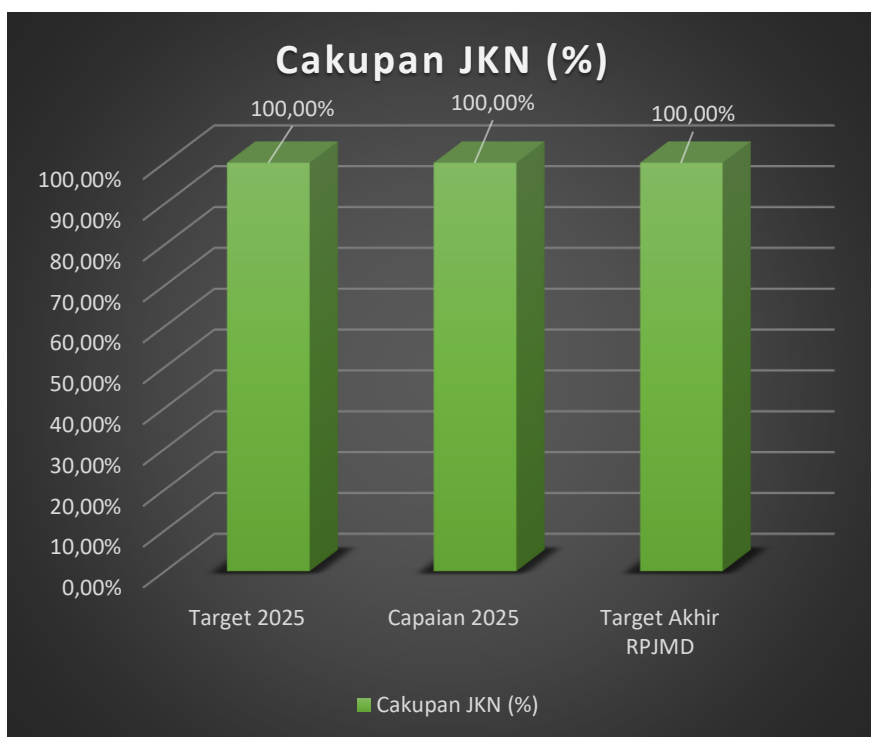
Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar **82**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **82,2**, sehingga indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai **target akhir**

RPJMD sebesar 95. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan melalui peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta peningkatan standar pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Diagram 3.2.7

Target dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan



Selanjutnya, Indikator **cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2025, target cakupan kepesertaan JKN ditetapkan sebesar **100%**, dan realisasi yang dicapai juga sebesar **100%**, sehingga indikator ini telah tercapai sepenuhnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan melalui program JKN. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala oleh faktor biaya.

Secara umum, capaian indikator pada sasaran strategis **Meningkatnya Status Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat** menunjukkan kinerja yang cukup baik. Beberapa indikator seperti **Angka Kematian Bayi, cakupan penemuan**

kasus tuberkulosis, serta cakupan kepesertaan JKN telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu **angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis** yang masih jauh di bawah target. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pengendalian tuberkulosis serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.2 Meningkatnya Perilaku Sehat Masyarakat

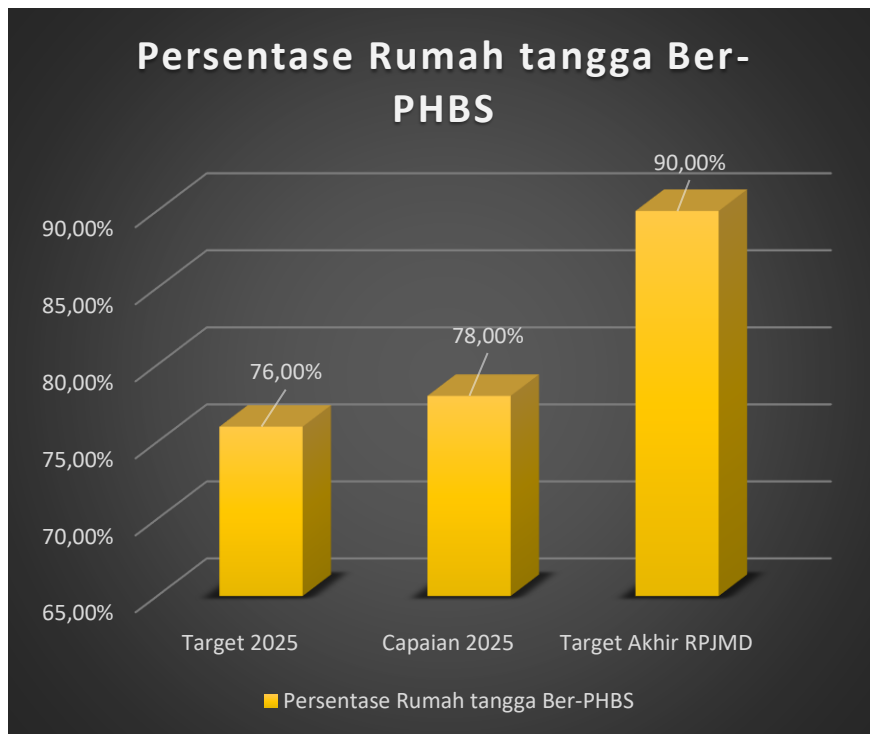
Perilaku sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat mencerminkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan melalui penerapan pola hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan perilaku sehat tidak hanya berkontribusi dalam mencegah terjadinya berbagai penyakit, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Upaya peningkatan perilaku sehat masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif, antara lain promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran kader kesehatan, serta penguatan kegiatan berbasis masyarakat seperti posyandu dan desa siaga. Selain itu, peningkatan akses terhadap sarana sanitasi yang layak, penyediaan air bersih, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Perilaku Sehat Masyarakat, digunakan indikator Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Indikator ini menggambarkan tingkat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS, maka semakin baik pula kondisi kesehatan masyarakat serta semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Diagram 3.2.8

Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS



Pada tahun 2025, target **Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS** ditetapkan sebesar **76%**, sedangkan realisasi yang dicapai adalah **78%**. Dengan demikian, capaian indikator ini telah **melampaui target yang ditetapkan**. Capaian indikator **Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS** yang melebihi target menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan penyuluhan PHBS kepada masyarakat,
- Penguatan peran kader kesehatan dan posyandu,
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,
- Peningkatan akses terhadap sarana sanitasi dan air bersih.

Meskipun capaian indikator tahun 2025 telah melampaui target, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 90%, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah

tangga yang belum sepenuhnya menerapkan indikator PHBS dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator ini antara lain:

1. Meningkatnya kegiatan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat,
2. Peran aktif kader kesehatan dan tenaga promosi kesehatan,
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Sementara itu, beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan PHBS antara lain:

- Masih adanya keterbatasan akses sanitasi layak di beberapa wilayah,
- Perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat,
- Perilaku masyarakat yang belum konsisten dalam menerapkan pola hidup sehat.

3.3 Analisis Capaian Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Tabel 3.3.1

Tabel Perbandingannya Capaian Program dan kegiatan dengan Target 2025

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Tata Kelola Perangkat daerah	80	%	80	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	4	Dok
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	4	Dok
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	4	Dok
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	4	Dok
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	4	Dok

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	2	Lap
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	4	Lap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	4	Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	4	Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	4	Dok
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	4	Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	4	Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	2	Lap
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	4	Lap
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Org/bln	8	Org/bln
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dok	2	Dok
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Org/bln	8	Org/bln
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dok	2	Dok
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	4	Lap
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	4	Lap

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	20	Orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	20	Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	30	Lap
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	30	Lap
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	0	Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	0	Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	3	Lap
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	4	Lap
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	3	Lap
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	4	Lap

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	20	Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	Unit
	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	20	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	Unit
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	100	Per 100.000 Kelahiran Hidup	65	Per 100.000 Kelahiran Hidup
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (	34,77	%	8,3 (E-PPGBM)	%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	Unit	2	Unit
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4	Unit	2	Unit
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	3	Unit
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10	Unit	11	Unit
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	3	Unit
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30	Unit	30	Unit
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100	Unit	100	Unit

		Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	Unit	0	Unit
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50	Paket	50	Paket
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas K	30	Paket	30	Paket
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	Unit	2	Unit
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4	Unit	2	Unit
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	3	Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10	Unit	11	Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	3	Unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30	Unit	30	Unit
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	100	Unit	100	Unit
	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	Unit	0	Unit

	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50	Paket	50	Paket
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas K	30	Paket	30	Paket
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000	Orang	7886	Orang
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000	Orang	7645	Orang
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500	Orang	7676	Orang
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	33753	Orang
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20000	Orang	54246	Orang
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15000	Orang	22572	Orang
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10000	Orang	19452	Orang
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000	Orang	1469	Orang
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	774	Orang
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30	Orang	80	Orang
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150	Orang	7373	Orang
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	Orang	1103	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10	Dok	10	Dok
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dok	5	Dok

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dok	5	Dok
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dok	5	Dok
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20	Orang	20	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10	Dok	10	Dok
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30	Dok	28	Dok
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50	Paket	20	Paket
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	Dok	2	Dok
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10	Dok	9	Dok
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	36	Dok	28	Dok
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	38	Unit	37	Unit
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	1	Unit
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Orang	1741	Orang
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100	Orang	338	Orang
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4	Dok	4	Dok
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000	Orang	7886	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000	Orang	7645	Orang

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500	Orang	7676	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	33753	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20000	Orang	54246	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15000	Orang	22572	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10000	Orang	19452	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000	Orang	1469	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	774	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30	Orang	80	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150	Orang	7373	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	Orang	1103	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10	Dok	10	Dok
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dok	5	Dok
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dok	5	Dok
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dok	5	Dok
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20	Orang	20	Orang
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10	Dok	10	Dok

	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30	Dok	28	Dok
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50	Paket	20	Paket
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	Dok	2	Dok
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10	Dok	9	Dok
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	36	Dok	28	Dok
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	38	Unit	37	Unit
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	1	Unit
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Orang	1741	Orang
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100	Orang	338	Orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4	Dok	4	Dok
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	Dok	3	Dok
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	Dok	3	Dok
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	10	Unit	10,00	Unit
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	10	Unit	10,00	Unit
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	50	%	50	%

	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Dok	1	Dok
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Dok	1	Dok
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40	Orang	22	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dok	1	Dok
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40	Orang	22	Orang
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dok	1	Dok
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	Orang	100	Orang
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	Orang	100	Orang
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	55	%	50,00	%
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1,00	Dok	1,00	Dok
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1,00	Dok	1,00	Dok
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	50	%	47	%

	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dok	1	Dok
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dok	1	Dok

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel yang diukur melalui Indeks Tata Kelola Perangkat daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan turut bertanggung jawab dalam melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah. Dapat dilihat bahwa sampai pada Tahun 2025 diperoleh bahwa capaian program tersebut masih belum memenuhi target yaitu sebesar 74,37 % dengan realisasi anggaran sebesar 78,02 % atau sebesar Rp 3.589.164.803 :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya capaian kegiatan tersebut 100 % dan sejalan dengan realisasi anggaran 99,89 %. Semua indikator sub kegiatan tercapai setiap targetnya.
- Kegiatan kedua yang terealisasi adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kegiatan 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,64%.
- Kegiatan ketiga yang terealisasi adalah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pada sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi capaian kegiatan 100 % dan realisasi anggaran sebesar 29.900.000.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi kegiatan pelatihannya sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 100 %
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi kegiatannya sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,94 %. Setiap sub kegiatan telah terlaksana dan telah memenuhi target yang ada.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 80 % dengan realisasi anggaran 80,58 %. Kegiatan mencakup sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi masih 62 % dengan realisasi anggaran 60,85 %. Sub kegiatan yang

tereliasasi yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- Adapun kegiatan yang tidak teralisasi dan serapan anggarannya masih 0 % yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan UKP dan UKM ini adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pemerintah daerah urusan bidang kesehatan. Adapun capaian program ini yaitu 91,75 %, dengan realisasi anggaran sebesar 92,11 % atau sebesar Rp. 100.148.350.379. Pada Program UKP dan UKM ini terdapat beberapa indikator kinerja antara lain :

a. Angka Kematian Ibu

Berdasarkan Laporan kasus Pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) kasus kematian ibu dari 7676 Kelahiran Hidup. Sehingga dari data tersebut dapat kita hitung Angka Kematian Ibu pada tahun 2025 tercatat sebesar **65 per 100.000 kelahiran hidup**, lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan yaitu **100 per 100.000 kelahiran hidup**, serta menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **67 per 100.000 kelahiran hidup**.

Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu, antara lain melalui:

- Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak,
- Peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan,
- Penguatan pelayanan antenatal care (ANC),
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Meskipun demikian, upaya penurunan AKI tetap perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem rujukan, peningkatan kualitas pelayanan obstetri dan neonatal emergensi, serta peningkatan deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil.

b. Prevalensi Stunting pada Balita

Prevalensi stunting pada balita tahun 2025 berdasarkan **EPPGBM** tercatat sebesar **8,3%**, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar **34,77%**, serta jauh menurun dari capaian tahun 2024 sebesar **37,60%**.

Penurunan prevalensi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting melalui berbagai program seperti:

- Peningkatan cakupan pelayanan gizi balita,
- Pemantauan pertumbuhan di Posyandu,
- Pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko,
- Edukasi gizi kepada keluarga.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa perbedaan metode sumber data antara survei nasional dan data EPPGBM dapat mempengaruhi hasil pengukuran, sehingga diperlukan konsistensi dalam pemantauan serta penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Seperti terlihat pada penjabaran di atas bahwa beberapa indikator sudah tercapai sesuai target dan tentu ini adalah hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan programnya. Selain itu juga perlu kroscek di lapangan terkait hasil laporan sehingga tidak terjadi postif palsu dalam dalam capaian program dinas kesehatan.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam meningkatkan status Kesehatan dan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat seperti terlihat pada dokumentasi gambar di bawah ini

Gambar 3.1

Pelaksanaan Posyandu Balita



Gambar 3.2

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Lansia Melalui Posyandu Lansia



Gambar 3.3
Pelayanan Kesehatan pada ibu hamil / *Antenatal care*



Gambar 3.4
Penjaringan di Sekolah



Gambar 3.5

Pelayanan Persalinan di Fasyankes Wilayah Kerja Dinas Kesehatan



Gambar 3.6
Melakukan perujukan pasien ke FKTL



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan memiliki capaian program yaitu 82,67 % dengan realisasi anggaran sebesar 68,64 % atau Rp. 3.118.306.908. Adapun kegiatan yang terlaksanan yaitu :

- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan yang memiliki reliasai yaitu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa dokumentasi pelaksaan kegiatan ini dapat dilihat sebagai beriku :

Gambar 3.6

Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan



Program ini diukur dengan indicator capaian peningkatan kompetensi SDM Kesehatan. Pada tahun 2025 capaian sebesar **50%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu **50%**, serta meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar **40%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan teknis, workshop serta pengembangan kompetensi professional. Peningkatan kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui program dan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan di wilayah kabupaten nias selatan secara merata.

Pemenuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan status kepegawaian yaitu ASN, Tenaga Kontrak dan juga Tenaga Kesehatan Sukarela.

Tabel 3.3.2

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Tenaga Medis / Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	58
2	Dokter GiGi	13
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1
4	Dokter Spesialis Anak	1
5	Dokter Spesialis Bedah	1
6	Dokter Spesialis Paru	1
7	Dokter Spesialis OBGYN	1
8	Perawat	939
9	Bidan	1107
10	Farmasi	121
11	Ahli Gizi Nutrition	41
12	Teknisi Medis	73
13	Sanitarian	42
14	Tenaga Kesehatan Masyarakat	152

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Capaian program ini dilihat dari pelaksanaan kegiatan sebesar 55% dengan realisasi anggaran sebesar 54,87% atau sebesar Rp. 38.089.000. Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara menyeluruh oleh karena kebijakan dan juknis pelaksanaan kegiatan yang belum dapat dipenuhi. Program ini diukur dengan indicator ersentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman.

Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar **50%**, masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu **55%**. Belum tercapainya target tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan,
- b. Keterbatasan tenaga pengawas,
- c. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas,
- d. Serta belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan.

Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang farmasi dan pangan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Capaian Program ini dilihat dari indikatornya yaitu persentase masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan sebesar 47 %, dengan realisasi anggaran sebesar 100 %. Pada tahun 2025, capaian indikator pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sebesar 47%, masih sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 50%.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti: pembinaan kader kesehatan, penguatan Posyandu, promosi kesehatan, serta penggerakan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan partisipasi masyarakat, kapasitas kader kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, serta keterbatasan dukungan sumber daya.

Pada pelaksanaan kegiatannya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan seluruh UPTD yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan yang menjadi tanggungjawab rutin dalam melaksanakan upaya promosi dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Capaian Usia Harapan Hidup pada tahun 2025 sebesar 71,92 tahun, sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 72 tahun.

Faktor penyebab belum tercapainya target :

- Masih tingginya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang mempengaruhi angka kematian pada usia produktif dan lanjut usia.
- Belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sebagian masyarakat.
- Keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah tertentu, terutama wilayah terpencil atau kepulauan.
- Faktor sosial ekonomi dan pola hidup masyarakat yang turut mempengaruhi derajat kesehatan.

Upaya yang perlu dilakukan :

- Penguatan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM).
- Peningkatan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat.
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

2. Indeks Keluarga Sehat

Capaian Indeks Keluarga Sehat tahun 2025 sebesar 0,78, masih di bawah target 0,82.

Faktor penyebab belum tercapainya target :

- Belum optimalnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
- Masih terdapat keluarga yang belum memenuhi indikator keluarga sehat seperti kepesertaan JKN, sanitasi layak, serta pengendalian penyakit kronis.
- Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pendataan dan pembinaan keluarga secara menyeluruh.

Upaya peningkatan :

- Penguatan implementasi PIS-PK oleh puskesmas.

- Peningkatan pembinaan keluarga melalui kader kesehatan dan tenaga promosi kesehatan.
- Integrasi program kesehatan berbasis keluarga.

3. Angka Kematian Bayi

Capaian Angka Kematian Bayi pada tahun 2025 sebesar 2 per 1.000 kelahiran hidup, lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 6 per 1.000 kelahiran hidup.

Faktor penyebab keberhasilan :

- Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan.
- Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- Peningkatan kualitas pelayanan neonatal esensial di fasilitas kesehatan.
- Penguatan pemantauan kehamilan melalui antenatal care.

Hal yang perlu dipertahankan :

- Peningkatan kualitas pelayanan maternal dan neonatal.
- Penguatan sistem rujukan bagi bayi dengan komplikasi.

4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Capaian indikator sebesar 123%, melampaui target yang ditetapkan yaitu 90%.

Faktor penyebab keberhasilan :

- Peningkatan kegiatan skrining dan penemuan kasus TB secara aktif di masyarakat.
- Penguatan jejaring pelayanan TB antara puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.
- Dukungan program nasional dalam percepatan eliminasi tuberkulosis.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan TB.

Dampak positif :

- Semakin banyak kasus TB yang dapat ditemukan dan diobati lebih dini, sehingga mencegah penularan di masyarakat.

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)

Capaian indikator tahun 2025 sebesar 61,60%, masih jauh di bawah target 90%.

Faktor penyebab rendahnya capaian :

- Masih adanya pasien TB yang tidak menyelesaikan pengobatan (lost to follow up).

- Kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan yang memerlukan waktu cukup lama.
- Keterbatasan pengawasan minum obat oleh pengawas menelan obat (PMO).
- Mobilitas pasien yang tinggi serta faktor sosial ekonomi.

Upaya perbaikan :

- Penguatan peran PMO dan kader TB di masyarakat.
- Peningkatan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait pentingnya menyelesaikan pengobatan.
- Pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan TB untuk pemantauan pasien secara berkelanjutan.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan

Capaian tahun 2025 sebesar 82,2, sedikit melampaui target yaitu 82.

Faktor penyebab keberhasilan :

- Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.
- Perbaikan sistem pelayanan dan administrasi kepada masyarakat.
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Hal yang perlu ditingkatkan:

- Konsistensi kualitas pelayanan.
- Responsivitas terhadap pengaduan masyarakat.

7. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Capaian indikator sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan :

- Dukungan pemerintah daerah dalam perluasan kepesertaan JKN.
- Integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan.
- Program penerima bantuan iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu.

Hal yang perlu dipertahankan :

- Keberlanjutan pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat miskin dan rentan.

8. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

Capaian indikator tahun 2025 sebesar 78%, melampaui target 76%.

Faktor penyebab keberhasilan :

- Intensifikasi kegiatan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat.
- Peran aktif kader kesehatan dan posyandu dalam pembinaan masyarakat.
- Dukungan lintas sektor dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dampak terhadap kesehatan masyarakat :

- Penurunan risiko penyakit menular dan tidak menular.
- Peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan keluarga.

3.5 EFISIENSI ANGGARAN

Tabel 3.5

Tabel Perhitungan Efisiensi Anggaran TA 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran 2025				
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (AA)	Realisasi (RA)	AA X COP	(AA X COP)-RA	Capaian (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10)=(8)X(7)	(11)=(10)-(9)	(12)=(9)/(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Angka Kematian bayi (AKB)	Per 1000 Kelahiran Hidup	6	2	300,00%	Rp117.982.672.475	Rp106.894.911.090	Rp353.948.017.423,50	Rp247.053.106.333,50	90,60%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	Nilai	82	82,2	100%					
		Cakupan JKN	Persentase	100%	100%	100%					
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	90%	123%	137%					
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persentase	90%	61,60%	68%					
2	Meningkatnya Perilaku Sehat Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persentase	76%	78%	103%	Rp406.321.800,00	Rp406.321.800,00	Rp417.014.478,95	Rp10.692.678,95	100,00%
Jumlah							Rp122.003.378.699,00	Rp113.641.726.298,96	Rp122.977.746.365,31	Rp9.336.020.066,35	
$\Sigma((AA \times COP)-RA)/\Sigma(AA)$									7,65%		

Efisiensi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 diperoleh sebesar 7,65 %, dimana Nilai tertinggi efisiensi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

3.6 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat dilihat di bawah ini :

Pagu Anggaran seluruhnya berjumlah Rp 118.388.994.274,50 dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp. 104.023.115.457,50 dan Belanja Modal sebesar Rp 14.365.878.817, dimana total realisasi anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 108.533.413.513,46 (91,67%)

Tabel 3.6
Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
selama Tahun 2025 sebesar Rp. 108.533.413.513,46 (91,67%)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang di evaluasi 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di evaluasi (%)	Persentase %
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 118.388.994.274,50	Rp 108.533.413.513,46	Rp 9.855.580.761,04	91,675%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.600.063.000	Rp 3.589.164.803	Rp 1.010.898.197	78,024%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.000.000	Rp 24.972.775	Rp 27.225	99,891%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.681.000,15	Rp 3.680.905,00	Rp 95,15	99,997%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.610.000,00	Rp 3.609.700,00	Rp 300,00	99,992%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.925.000,00	Rp 3.925.000,00	Rp -	100,000%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.570.000,00	Rp 3.569.700,00	Rp 300,00	99,992%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 3.305.000,00	Rp 3.304.700,00	Rp 300,00	99,991%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.630.000,00	Rp 3.603.795,00	Rp 26.205,00	99,278%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.279.000,00	Rp 3.278.975,00	Rp 25,00	99,999%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 260.360.000	Rp 251.605.430	Rp 8.754.570	96,638%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	244.800.000	236.050.000	Rp 8.750.000,00	96,426%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.560.000	15.555.430	Rp 4.570,00	99,971%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 30.000.000	Rp 29.900.000	Rp 100.000	99,667%

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 30.000.000	Rp 29.900.000	Rp 100.000,00	99,667%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 104.000.000	Rp 104.000.000	Rp -	100,000%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 104.000.000	Rp 104.000.000	Rp -	100,000%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 866.816.665	Rp 866.292.326	Rp 524.339	99,940%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 25.201.330,00	Rp 25.197.375,00	Rp 3.955,00	99,984%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 25.228.700,00	Rp 25.197.375,00	Rp 31.325,00	99,876%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 91.291.045,00	Rp 91.290.830,00	Rp 215,00	100,000%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 39.076.590,00	Rp 39.076.380,00	Rp 210,00	99,999%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 686.019.000,00	Rp 685.530.366,00	Rp 488.634,00	99,929%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 34.699.600	Rp -	Rp 34.699.600	0,000%
	Pengadaan Mebel	Rp 34.699.600,00	Rp -	Rp 34.699.600,00	0,000%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.607.280.000	Rp 1.295.090.000	Rp 312.190.000	80,577%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.200.000,00	Rp 19.900.000,00	Rp 5.300.000,00	78,968%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.582.080.000,00	Rp 1.275.190.000,00	Rp 306.890.000,00	80,602%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.671.906.735	Rp 1.017.304.272	Rp 654.602.463	60,847%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 540.696.734,85	Rp 230.477.080,00	Rp 310.219.654,85	42,626%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.131.210.000,00	Rp 786.827.192,00	Rp 344.382.808,00	69,556%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp108.728.087.458,50	Rp101.380.531.002,46	Rp7.347.556.456,04	93,242%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.930.778.837,98	Rp 26.496.627.513,00	Rp 1.434.151.324,98	94,865%
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp 5.536.916.469,00	Rp 5.526.667.842,00	Rp 10.248.627,00	99,815%
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 434.000.000,00	Rp 432.670.000,00	Rp 1.330.000,00	99,694%
	Pengembangan Puskesmas	Rp 1.036.000.000,00	Rp 1.035.090.000,00	Rp 910.000,00	99,912%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 3.184.488.800,00	Rp 3.177.127.600,00	Rp 7.361.200,00	99,769%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 902.745.000,00	Rp 501.029.322,00	Rp 401.715.678,00	55,501%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 2.500.000.000	Rp 2.444.951.552	Rp 55.048.448,00	97,798%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rp 250.000.000	Rp 249.671.250	Rp 328.750,00	99,869%
	Pengembangan Rumah Sakit	Rp 833.950.000,00	Rp -	Rp 833.950.000,00	0,000%

	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 11.926.213.455,98	Rp 11.808.914.726,00	Rp 117.298.729,98	99,016%
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 1.326.465.113,00	Rp 1.320.505.221,00	Rp 5.959.892,00	99,551%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 79.769.604.070,52	Rp 73.990.703.454,46	Rp 5.778.900.616,06	92,756%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp1.677.119.000,00	Rp622.937.770,00	Rp 1.054.181.230,00	37,143%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 47.500.000,00	Rp -	Rp 47.500.000,00	0,000%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 846.519.000,00	Rp 846.497.988,00	Rp 21.012,00	99,998%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 241.695.000,00	Rp 240.530.000,00	Rp 1.165.000,00	99,518%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 828.760.000,00	Rp 819.760.000,00	Rp 9.000.000,00	98,914%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 401.000.000,00	Rp 395.600.000,00	Rp 5.400.000,00	98,653%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 13.264.179.000,00	Rp 13.250.997.589,00	Rp 13.181.411,00	99,901%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 1.172.155.000,00	Rp 1.165.555.000,00	Rp 6.600.000,00	99,437%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 3.212.610.000,00	Rp 3.039.160.000,00	Rp 173.450.000,00	94,601%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 3.545.128.000,00	Rp 3.459.089.800,00	Rp 86.038.200,00	97,573%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 1.641.690.000,00	Rp 1.634.980.000,00	Rp 6.710.000,00	99,591%
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 3.973.060.000,00	Rp 3.969.010.000,00	Rp 4.050.000,00	99,898%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 30.905.506.234,94	Rp 29.912.467.468,46	Rp 993.038.766,48	96,787%
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 17.836.984,00	Rp 6.288.800,00	Rp 11.548.184,00	35,257%
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp 703.333.152,58	Rp 623.819.210,00	Rp 79.513.942,58	88,695%
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 6.683.142.200,00	Rp 5.739.466.930,00	Rp 943.675.270,00	85,880%
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 9.178.190.999,00	Rp 6.948.128.931,00	Rp 2.230.062.068,00	75,703%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 139.559.500,00	Rp 117.660.650,00	Rp 21.898.850,00	84,309%
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 1.000.000.000,00	Rp 924.328.155,00	Rp 75.671.845,00	92,433%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp 200.000.000	Rp 184.309.719	Rp 15.690.281,00	92,155%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Rp 90.620.000,00	Rp 90.115.444,00	Rp 504.556,00	99,443%

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp 867.168.250	Rp 736.239.335	Rp 130.928.915	84,902%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 867.168.250,00	Rp 736.239.335,00	Rp 130.928.915,00	84,902%
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 160.536.300	Rp 156.960.700	Rp 3.575.600	97,773%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 160.536.300,00	Rp 156.960.700,00	Rp 3.575.600,00	97,773%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 4.583.283.692	Rp 3.118.306.908	Rp 1.464.976.784	68,037%
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 66.206.846	Rp 65.876.682	Rp 330.164	99,501%
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp 66.206.846,00	Rp 65.876.682,00	Rp 330.164,00	99,501%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 3.216.246.096	Rp 1.905.149.446	Rp 1.311.096.650	59,235%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp 2.870.000.000,00	Rp 1.563.251.493,00	Rp 1.306.748.507,00	54,469%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 346.246.096,00	Rp 341.897.953,00	Rp 4.348.143,00	98,744%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.300.830.750	Rp 1.147.280.780	Rp 153.549.970	88,196%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.300.830.750,00	Rp 1.147.280.780,00	Rp 153.549.970,00	88,196%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 71.238.324	Rp 39.089.000	Rp 32.149.324	54,871%
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 71.238.324	Rp 39.089.000	Rp 32.149.324	54,871%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 71.238.324,00	Rp 39.089.000,00	Rp 32.149.324,00	54,871%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 406.321.800	Rp 406.321.800	Rp -	100,000%
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 406.321.800	Rp 406.321.800	Rp -	100,000%
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 406.321.800,00	Rp 406.321.800,00	Rp -	100,000%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan menunjukkan hasil yang bervariasi antara indikator yang telah mencapai target, melampaui target, maupun yang masih di bawah target.

Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, indikator Usia Harapan Hidup (UHH) terealisasi sebesar 71,92 tahun dari target 72 tahun, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama terkait penyakit tidak menular, perilaku hidup masyarakat, dan akses layanan kesehatan. Indikator Indeks Keluarga Sehat juga belum optimal dengan capaian 0,78 dari target 0,82, yang mengindikasikan bahwa intervensi keluarga sehat masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek promotif dan preventif.

Pada sasaran meningkatnya status kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, terdapat capaian yang cukup baik, antara lain:

- Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 2 per 1.000 kelahiran hidup, lebih baik dari target 6 per 1.000 kelahiran hidup, menunjukkan keberhasilan intervensi pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis mencapai 123% dari target 90%, yang menunjukkan keberhasilan dalam penemuan kasus.

Namun demikian, indikator keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) hanya mencapai 61,60% dari target 90%, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam keberlanjutan pengobatan dan kepatuhan pasien.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai 82,2 dari target 82, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan relatif baik, sementara cakupan JKN telah mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan.

Pada sasaran meningkatnya perilaku sehat masyarakat, indikator Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS mencapai 78% dari target 76%, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dari aspek efisiensi dan efektivitas program, beberapa program telah menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi (hingga 100%), namun belum sepenuhnya menghasilkan outcome yang optimal, seperti pada program pemberdayaan masyarakat yang capaian indikatornya masih di bawah target (47% dari target 50%). Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa:

- Capaian output relatif baik, ditunjukkan oleh tingginya realisasi kegiatan dan anggaran,
- Namun capaian outcome belum sepenuhnya optimal dan merata, terutama pada indikator strategis seperti UHH dan keberhasilan pengobatan TB,
- Masih terdapat kesenjangan antara capaian program dengan dampak yang dihasilkan, yang perlu menjadi fokus perbaikan ke depan.

4.2 Saran / Rekomendasi Strategis

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan memperkuat pencapaian outcome pembangunan kesehatan, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Fokus pada peningkatan indikator yang belum tercapai. Intervensi difokuskan pada peningkatan UHH, Indeks Keluarga Sehat, dan keberhasilan pengobatan TB melalui pendekatan promotif, preventif, serta peningkatan kualitas layanan kuratif.
2. Penguatan kesinambungan layanan (continuum of care), khususnya dalam penanganan tuberkulosis dan penyakit tidak menular, untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan menurunkan angka kematian.
3. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kapasitas kader, partisipasi masyarakat, serta efektivitas kegiatan promosi kesehatan agar capaian indikator dapat sesuai target.
4. Peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, mengarahkan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap indikator outcome, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum memberikan hasil optimal.
5. Penguatan akses pelayanan kesehatan di wilayah sulit, melalui distribusi tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana, serta inovasi layanan untuk menjangkau daerah terpencil dan kepulauan.

6. Penguatan sistem data dan monitoring kinerja, meningkatkan kualitas data kinerja yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi program.
7. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melalui inovasi pelayanan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.